

MPRA

Munich Personal RePEc Archive

Impact of Unconventional Tin Mining in Lampur Village, Central Bangka Regency

Indra, Citra Asmara

Universitas Bangka Belitung

1 December 2013

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92813/>
MPRA Paper No. 92813, posted 17 Mar 2019 05:21 UTC

DAMPAK DARI PENAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL DI DESA LAMPUR KABUPATEN BANGKA TENGAH

Oleh : *Citra Asmara Indra, S.Sos., M.A.*

Abstract

Lampung village is an area that still has a lot of Tin deposits are characterized by the emergence of a lead-mining-camp camp inkonvensional at many points in this area. Lampung indeed simply a village administratively, but became a mixture of the two districts and some districts. In 2001, when the autonomous region and the rampant mining it, the village became the main destination Lampung miners entrants to dig the Tin. The impact of the change in behavior IT mining village community consumer as well as being perceived Lampung also by the school, when many students are reduced because they prefer to seek fortune in the location of it and the fact it was left by its parents resulting in increased dropout rates.

Keyword : Lampung village, Inconventional Tin Minning, Tin Minners, Impact of Inconventional Tin Minning

I. PENDAHULUAN

1. Desa Lampung Sebelum Penambangan Timah Inkonvensional (Pra-ORBA)

Desa Lampung sebagai sebuah kawasan kaya timah menyajikan berbagai potensi yang menarik untuk dikaji. *Pertama* bahwa Lampung adalah sebuah kawasan yang sejak dulu menjadi simpul-simpul penambangan timah. Kejayaan timah pada masa lalu dapat dilihat pada dua hal, yakni keberadaan makam Tionghoa di daerah ini yang menjadi penanda eksistensi *coolie* timah Tionghoa dan keberadaan perumahan dan kawasan elit milik perusahaan timah pada tahun 1970-an. Artefak itu bisa dilihat hingga kini. *Kedua*, Desa Lampung adalah daerah yang masih menyisakan

kandungan timah yang banyak ditandai dengan munculnya camp-camp penambangan timah inkonvensional di banyak titik di kawasan ini. Lampung memang hanyalah sebuah desa secara administratif, namun menjadi daerah persilangan dua kabupaten dan beberapa kecamatan.

Desa Lampung secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, desa ini relatif mudah untuk dicapai karena jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat Kota Pangkal Pinang dan tersedianya angkutan umum dengan kondisi cukup ramai, walaupun masyarakat setempat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi sebagai

alat transportasi. Sedangkan batas-batas wilayah Desa Lampur, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keretak, Kec. Sungai Selan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Munggu, Kec. Sungai Selan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Selan, Kec. Sungai Selan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kerantai, Kec. Sungai Selan

Adapun jarak tempuh, waktu dan letak desa Lampur dari pusat Kota Pangkal Pinang dan Koba adalah sebagai berikut :

- Jarak ke Ibukota dari Kecamatan Sungai Selan, Desa Sungaiselan 7 km
- Jarak ke Ibukota Kabupaten, Kota Koba 60 km
- Jarak ke ibukota Provinsi, Kota Pangkal Pinang 40 km
- Waktu tempuh ke Ibukota kecamatan 30 menit
- Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten 1 jam 15 menit
- Waktu tempuh ke Pusat Fasilitas Terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan) 1 jam (Monografi Desa/Kelurahan Lampur 2010).

Rentang waktu setelah ditinggalkan PT. Timah, Tbk., di tahun 1970-an Desa

Lampur menjadi desa yang hampir lumpuh diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang hanya mengandalkan perkebunan lada dan menjadi nelayan. Letak Desa Lampur berada di tengah desa-desa lainnya dan pernah menjadi salah satu basis daerah pertimahan yang populer pada tahun 1970-an pada waktu itu masih dikuasai oleh PT. Timah, Tbk yang dimiliki oleh negara. Namun karena alasan tidak efisien dan dinilai kurang menguntungkan karena biji timah tidak banyak lagi ditemukan, Desa Lampur ditinggalkan oleh PT. Timah, Tbk. Ketika ada perubahan regulasi yang memungkinkan masyarakat melakukan penambangan, maka daerah-daerah bekas penambangan PT. Timah, Tbk kemudian ditambang ulang dengan berbagai peralatan, mulai dari peralatan sederhana sampai peralatan berskala besar, sehingga menjadikan Desa Lampur ini sekarang menjadi kampung para penambang timah, dengan banyak perubahan sosial yang terjadi di dalamnya.

Pada tahun 2001 ketika Otonomi Daerah dan maraknya penambangan TI, Desa Lampur menjadi tujuan utama para penambang pendatang untuk menggali timah. Di kawasan Lampur, masyarakat

penambang datang dari berbagai daerah, termasuk dari provinsi lain Pulau Sumatera. Mereka tinggal dalam pemukiman darurat yang didirikan dengan sederhana, lengkap dengan dapur kecil dan tempat tidur sekedarnya bagi anggota kelompok mereka. Lampung menyajikan sebuah representasi pertimahan pasca Orde Baru.

2. Desa Lampung Setelah Penambangan Timah Inkonvensional (Pasca ORBA)

Penduduk Desa Lampung terdiri dari masyarakat yang heterogen baik dari suku, agama, jenis pekerjaan maupun tingkat pendidikan. Keanekaragaman penduduk di Desa Lampung ini dilatarbelakangi oleh kembali maraknya penambangan Timah Inkonvensional sehingga menarik bagi para penambang, khususnya masyarakat pendatang untuk datang ke desa ini. Jika ditinjau dari asalnya penduduk asli Desa Lampung adalah masyarakat Bangka asli. Namun seiring dengan proses perkembangan waktu maka penduduk asli hanya tinggal sedikit saja, karena sebagian pindah ketika Desa Lampung ditinggalkan oleh PT. Timah, Tbk, pada awalnya penduduk yang mendiami desa ini adalah para karyawan PT. Timah, Tbk

yang pada waktu itu sedang berada di masa kejayaannya.

Para Penambang umumnya masyarakat pendatang dari luar desa, luar kabupaten bahkan luar provinsi. Mereka mendiami pondok-pondok yang dibangun di sekitar kawasan penambangan Timah Inkonvensional. Tempat tinggal mereka bersifat sementara dan tidak dapat ditentukan kapan mereka akan pindah dikarenakan itu semua tergantung dari banyak atau tidaknya biji timah ditemukan pada satu lokasi penambangan Timah Inkonvensional. Ketika selesai masa tambang, mereka berpindah dan mencari sumber lokasi timah lainnya. Umumnya para penambang ini hanya datang ke Desa Lampung tidak untuk menetap di sana, dan mereka tidak membawa serta keluarga seperti istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan data yang didapatkan dari data Laporan Bulanan Desa Lampung, populasi penduduk Tahun 2010 adalah 3901 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki adalah 1974 jiwa, perempuan adalah 1927 jiwa. Jumlah para penambang sekaligus buruh harian termasuk di dalamnya para pendatang adalah 611 jiwa (Monografi Desa/Kelurahan Lampung 2010).

Untuk menunjang aktivitas keagamaan, kesehatan dan fasilitas olah raga, pemerintah desa Lampung menyediakan berbagai fasilitas tersebut. Keadaan ekonomi masyarakat desa Lampung cukup beragam, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai PNS, petani, peternak, petani tambak, pemilik usaha kerajinan, industri rumah tangga, guru, petugas kesehatan, dan bergerak dalam usaha perdagangan, dan umumnya mereka hidup dengan taraf ekonomi yang berkecukupan.

Nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat di desa Lampung merupakan nilai tradisional pra kapitalistik yang telah mulai pudar dan berbaur dengan budaya modern kapitalistik. Unsur-unsur nilai lama yang dulunya dipegang teguh oleh masyarakat sudah banyak yang berubah. Perpaduan budaya lama yang masih bertahan dan budaya baru yang masuk telah mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat di desa Lampung ini.

II. PEMBAHASAN

3. Kondisi di Balik Terbitnya Regulasi Tentang Penambangan Timah

Terbitnya Surat Keputusan Bupati Bangka No.

540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Usaha Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor) merupakan salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Bangka dalam usaha untuk terus melegalkan usaha tambang Timah Inkonvensional. Keluarnya SKEP Bupati Bangka tersebut dan Perda No. 21/2001 tentang Pelaksanaan Pertambangan Umum di Bangka serta Perda No. 2/2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Ekspor Pasir Timah Biasa merupakan respon atas terbitnya Kepmenperindag No. 294/MPP/Kep/10/2001 yang kembali tidak memuat tata niaga timah sebagai barang yang diatur, mengakibatkan tafsir atas timah yang awalnya adalah komoditas strategis menjadi barang bebas yang perdagangannya tidak diawasi. Menurut Bupati Bangka pada saat itu, Perda kemudian SKEP No. 540.K/271/Tamben/2001 tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Romli: 115)

Perda No. 6/2001 Bupati Bangka ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan penambangan, dan terutama untuk para pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis perdagangan pasir timah ini yang pada dasarnya adalah terutama bekas pemilik Tambang Kontrak Karya yang semula

terikat dengan PT. Timah, Tbk. Mereka umumnya adalah keturunan Cina, yang mendapat peluang mengekspor timah langsung ke luar Bangka sangat menguntungkan bagi mereka. Selain perbedaan harga yang tinggi, yang terpenting juga telah memotong jalur pemasaran timah yang hierarkis dan birokratis. Dalam hal ini perbedaan harga misalnya apabila mereka menjual pasir timah ke Singapura, maka perbedaannya bisa mencapai 24 ribu rupiah per kilogram. Selain itu juga persyaratan mengenai kualitas timah yang harus disetorkan ke PT. Timah, Tbk., sangat berat yaitu dengan kadar timah 72 SN, (Erman, 2007:235).

Alasan dari Keputusan Bupati Bangka tersebut bisa dimengerti disebabkan lesunya roda perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dikarenakan turunnya harga lada secara drastis hingga mencapai 12 ribu per kilogram pada awal tahun 2003, sehingga dengan adanya Perda dan SKEP tersebut membawa angin segar bagi masyarakat yang secara instan bisa mendapatkan uang *cash* secara langsung berkebalikan apabila masih menjadi petani lada yang membutuhkan kesabaran luar biasa baru bisa panen.

Sebenarnya tidak ada data statistik yang cukup dipercaya mengenai jumlah TI di seluruh pulau Bangka, karena selain sebagai sebuah aktivitas ekonomi informal, pergerakan TI yang tinggi juga menyulitkan pihak PT. Timah, Tbk. maupun instansi terkait di daerah untuk mendata jumlah TI secara tepat. Diperkirakan pada tahun 2001, jumlah TI mencapai 6000 unit dan pada tahun 2004 lebih kurang meningkat 400% dari tahun sebelumnya. Sementara menurut data dari Asosiasi Tambang Timah Rakyat (Astira), jumlah TI justru kurang lebih mencapai 13.345 unit. Jika diakumulasikan dengan TI yang tidak terdaftar, diperkirakan total jumlah TI mencapai 18.000 unit (Susilo & Maemunah, 2009 : 78).

Satu unit TI dioperasionalkan oleh 2-5 orang, tergantung besar kecilnya skala TI. Jika saja diasumsikan tiap TI dioperasionalkan rata-rata 3 orang, maka jumlah pekerja TI akan mencapai sekitar 54.000 orang. Estimasi ini belum termasuk para pekerja yang mengais di ujung operasional TI yang disebut dengan istilah pelimbang, termasuk di dalamnya adalah para perempuan dan anak-anak. Para pelimbang biasanya mengumpulkan lagi timah sisa operasional TI. Estimasi ini juga tidak

menyertakan estimasi mengenai pelimbang yang menggunakan peralatan sederhana dengan cara menggali dan mengayak di pinggiran kolong atau sungai.

Pekerjaan menambang di tengah kebuntuan ekonomi adalah sektor baru yang sangat menjanjikan. Peralatan yang dibutuhkan pun bervariasi, mulai dari peralatan manual dan ayakan saja, sampai mengeluarkan modal untuk pengadaan peralatan TI yang berkisar 5-40 juta, tergantung skala yang diinginkan. Setiap kelompok penambang biasanya mengoperasikan minimal satu mesin penghisap dengan kedalaman sekitar 4 meter dan luas lebih kurang 500 meter persegi (Kompas, 4/2/2011).

Penghasilan TI dengan modal besar bisa menghasilkan keuntungan yang besar pula, satu unit bisa mencapai 4 juta rupiah perhari dengan bayaran untuk buruh berkisar 150 ribu rupiah. Anak-anak yang bekerja dengan mengumpulkan timah dari sisa TI bisa juga mendapatkan penghasilan lebih kurang 40-90 ribu rupiah per hari. Investasi dalam jumlah 15 juta rupiah dapat kembali hanya dalam tempo satu minggu. Pendapatan masyarakat meningkat tajam dengan hasil yang didapat dari TI (Rahman, 2006 : 6).

Sebagaimana diharapkan Bupati Bangka dengan mengeluarkan Perda dan SKEP, hasil yang didapatkan membawa akibat positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumbangan begitu besar dari sektor pertimahan antara bulan Januari – September 2001 mencapai 9 miliar rupiah, dan angka ini jauh lebih besar dibanding sumbangan PT. Timah, Tbk.yang hanya 2 sampai 3 miliar per tahun ke Pemkab Bangka (Bangka Pos, 16/9/2003). Sedangkan di lain pihak, keberadaan TI dan perusahaan pengeksportimah merupakan pesaing baru bagi PT. Timah, Tbk, sebab produksi TI jauh lebih besar, karena mereka tidak hanya mengandalkan peralatan berat saja dengan alat sederhana pun mereka bisa menghasilkan timah dengan kualitas cukup baik. Dengan kondisi seperti itu, PT. Timah, Tbk., tidak lagi memonopoli penambangan dan perdagangan timah di Bangka Belitung, dan menyalahkan bahwa suplai TI yang berlebihan sebagai awal menurunnya harga timah di pasaran internasional (Ibrahim, 2011: 64).

Kondisi ini terus berlangsung dan mengakibatkan neraca keuangan PT. Timah, Tbk., berada dalam kondisi terburuk dalam sejarah sejak berdirinya perusahaan tersebut. Meskipun

keberadaan TI bukanlah satu-satunya yang membawa PT. Timah, Tbk., di ambang kehancuran, para anggota DPRD I dan DPRD II dari dua partai besar, memberikan kritikan tajam dengan mengatakan bahwa terjadinya permainan elit kuasa antara Perda Bupati versus KepMenperindag sehingga dibentuklah Tim Sebelas yang terdiri dari para wakil dan pemerintah kabupaten, kotamadya, dan provinsi, serta PT. Timah, Tbk., dan PT. Koba Tin menemui Menteri Dalam Negeri (Romli, 2007:100).

Hasil dari pertemuan tersebut adalah terbitnya KepMenperindag No. 443/MPP/Kep/2002 tentang Pelarangan Ekspor Timah dalam bentuk pasir timah dan terlebih dahulu harus dicairkan dan baru boleh di ekspor dalam bentuk batangan, selanjutnya para eksportir timah harus memiliki wilayah kuasa penambangan.

Terbitnya KepMerindag tersebut, telah memicu terjadinya resistensi tersebut, dikarenakan kalangan pengusaha paling keras bersuara yaitu Direktur Utama Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemkab Bangka (Romli, 2007:110), yaitu PT. Bangka Global Mandiri. Menurutnya, keputusan pencabutan ijin ekspor pasir timah

tidaklah memberikan jalan keluar bagi pemecahan menyeluruh terhadap persoalan bisnis timah, sebab akan membawa keresahan bagi 11.000 penambang rakyat yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada TI. Resistensi lainnya datang dari salah satu anggota DPRD tingkat I dari partai besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus pengusaha timah yang tidak lagi bermitra dengan PT. Timah, Tbk., yang menyayangkan keputusan larangan eksportir pasir timah tersebut. Perdebatan tentang Kepmenperindag tersebut telah menempatkan partai besar di level provinsi pada posisi yang berlawanan, satu partai besar mendukung keputusan Menteri Perdagangan dan Industri, dan satu partai besar lainnya yang merupakan kendaraan Bupati Bangka saat itu yang memprotes keputusan tersebut.

4. Istilah-istilah dalam Dunia Penambangan Timah

1. *Penambang* adalah orang yang bekerja di TI-TI. Aktivitas menambang biasanya dikenal dengan istilah *nambang* (istilah yang dipakai oleh masyarakat). Penambang ini dipekerjakan oleh pemilik TI untuk mengoperasikan

mesin tambang, seperti menyemprot tanah bercampur timah, menyelam, menyemprot tanah untuk mendapatkan tanah dengan campuran timah, dan aktivitas eksploitasi lainnya. Para penambang biasanya digaji berdasarkan penghasilan yang didapatkan setelah penghitungan total penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Penghitungan umum digunakan adalah dengan sistem persentase antara pemilik dan semua penambang dalam setiap satuan kilogram timah yang dijual.

2. *Pelimbang* adalah masyarakat yang bisa terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, atau kombinasi semuanya yang mengayak atau mengais timah sisa pembuangan pencucian TI orang lain. Para pelimbang ini tidak memerlukan modal untuk mendapatkan timah, tetapi hasil timah yang mereka dapatkan adalah timah dengan kualitas rendah. Hasil pencucian timah oleh TI yang berbentuk limbah timah biasanya dialirkan ke sebuah tempat di lokasi sekitar penambangan TI dan umumnya masih menyisakan timah. Dalam satu TI, biasanya akan ada 5-10 orang yang akan melakukan pelimbangan. Tidak ada ikatan apapun antara pemilik TI dengan pelimbang karena biasanya limbah buangan TI sudah dianggap tidak

bernilai ekonomi lagi oleh para pemiliknya.

3. *Mitra* adalah orang atau perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi yang kuasa penambangannya dimiliki oleh perusahaan PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin. Kedua perusahaan ini memiliki kawasan pertambangan yang luas. Biasanya perusahaan ini melakukan penambangan dan kemudian mereklamasinya, namun belum semua timah di dalamnya dieksplorasi karena pertimbangan kedalaman, peralatan, atau skala prioritas lokasi lainnya. Untuk mengantisipasi suplai dan efisiensi biaya, kedua perusahaan ini menyerahkan penambangan kepada mitra dengan keharusan mitra untuk menjual hasil galian timah kepada perusahaan pemilik kuasa penambangan. Sistem mitra akan menguntungkan kedua perusahaan ini karena mereka tidak dikenai kewajiban untuk menanggung segala resiko dari kegagalan atau kecelakaan kerja yang terjadi.

4. Aktor lain yang berperan adalah kolektor. Kolektor adalah individu atau beberapa orang yang melakukan aktivitas membeli timah dari para pelimbang TI atau penyelewengan timah

dari mitra untuk kemudian dijual kembali kepada perusahaan pelebur. Perusahaan pelebur selain PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin adalah perusahaan peleburan yang baru berdiri pasca Orde Baru disebut dengan istilah *smelter*. Umumnya para kolektor menjadi supplier utama pemasok utama smelter di luar kedua perusahaan tersebut. Biasanya para kolektor lebih senang menjual kepada para smelter karena pertimbangan harga jual yang lebih tinggi.

5. *Smelter* adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan peleburan timah dari biji timah menjadi timah batangan. Perusahaan smelter merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh pengusaha lokal, nasional, atau gabungan keduanya. Beberapa perusahaan smelter dimiliki oleh politisi, baik yang duduk maupun tidak menjadi anggota legislatif.

6. Istilah lain adalah peleburan yang merupakan kegiatan melebur biji timah menjadi batangan. Peleburan timah dimiliki oleh PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin, sementara bagi smelter, peleburan adalah aktivitas utama mereka dalam menghasilkan timah batangan dalam keadaan tidak bermerk (*unbranded*) karena pasaran dunia hanya

mengenal istilah Banka Tin dan Koba Tin. Kegiatan peleburan perusahaan smelter ini melakukan kegiatan penjualan langsung hasil peleburan, baik langsung ke luar negeri maupun antar pulau.

7. Pengusaha timah adalah mereka yang baik secara individu maupun kelompok melakukan aktivitas olah dan jual beli timah. Pengusaha timah dalam konteks masyarakat pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pemilik TI, kolektor dan pemilik smelter.

8. Kolong berasal dari bahasa daerah Bangka yang berarti lubang-lubang besar memiliki kedalaman dan lebar bervariasi, tergantung kandungan timah yang terdapat di dalamnya. Semakin padat timah yang terkandung, semakin dalam dan luas kolong yang dibuat. Secara umum, kolong saling berdekatan dan pada beberapa tempat kolong tersebut menyatu setelah hujan sehingga membentuk kolong besar menyerupai danau. Topografi Kepulauan Bangka Belitung kini menyajikan pemandangan kolong-kolong di hampir semua sudut, baik kolong kecil, sedang dan besar.

III. PENUTUP

5. Dampak dari Penambangan Timah Inkonvensional

Masyarakat Desa Lampung khususnya serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, pada dasarnya terbelah dalam dua kelompok ketika menyikapi masalah pertimahan. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menganggap bahwa kondisi pertimahan di Kepulauan Bangka Belitung mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Roda ekonomi berputar sebagai akibat perputaran uang timah yang besar, masyarakat tidak lagi menjadi penonton, dan ini adalah perwujudan dari otonomi daerah yang memberikan hak penguasaan lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Sementara kelompok kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa praktik pertimahan yang berkembang selama 13 tahun terakhir ini lebih banyak memberikan dampak seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Argumentasi kelompok pertama umumnya didengungkan oleh kelompok yang menikmati keuntungan besar dalam bisnis pertimahan, baik pelimbang, penambang, pengusaha, pebisnis,

maupun jaringan mafia. Sementara kelompok kontra umumnya adalah aktivis lingkungan, akademisi, dan sebagian pejabat. Kedua kelompok ini melihat dari perspektif berbeda, namun satu hal yang pasti bahwa pergerakan kelompok kedua umumnya hanya sampai pada level wacana. Para aktor lain yang lebih banyak memerankan fungsi pengawas adalah media massa melalui berita-berita dan tajuknya, meski kenyataannya ada beberapa media massa yang juga didirikan untuk kepentingan *back up* isu.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa pada level bawah, masyarakat yang tidak mengetahui tentang perdebatan pada level atas, jelas hanya menikmati dan puas dengan hasil instan dari eksploitasi timah. Kehidupan masyarakat di Desa Lampung, berubah dengan adanya pendapatan instan dari adanya TI. Sejak ditinggalkan oleh PT. Timah, Tbk. seperti daerah-daerah lainnya, Lampung menjadi kota separuh mati karena pada saat PT. Timah, Tbk. berkuasa, keberlangsungan masyarakat Desa Lampung bergantung sepenuhnya kepada PT. Timah, Tbk. Kontribusi eksploitasi timah di Desa Lampung terhadap perekonomian warga setempat

sayangnya tidak diikuti perubahan budaya ke arah yang lebih positif.

Pergantian profesi pekerjaan dari petani, nelayan, buruh bangunan dengan penghasilan pas-pasan menjadi penambang TI serta menghasilkan uang banyak dalam waktu cepat, mengakibatkan pergeseran pola perilaku pada kehidupan masyarakat Desa Lampung. Beramai-ramai mereka beralih profesi dan berubah menjadi masyarakat konsumtif dan agresif. Dari ketiadaan secara materi kemudian dalam waktu singkat semuanya bisa didapatkan. Dampak dari penambangan TI ini dirasakan juga oleh pihak sekolah, ketika banyak murid berkurang karena mereka lebih suka mencari rejeki di lokasi TI dan fakta ini dibiarkan oleh para orang tua murid sehingga mengakibatkan angka putus sekolah semakin bertambah. Seperti yang dituturkan oleh Abdul Rahim (45 tahun) kepada peneliti:

“banyak budak-budak gak agik sekolah gara-gara TI neh, cemani dak men sehari ge kare dapet 50 ribu, mak kek apak e dak retak yang penting banyak dapet duit, mumpung agik ade timah kek diambik kate jorang, duit dari nambang TI jorang buet meli meli mubil, mutur, muet rumah, sekaput pelesir, anak dak sekolah dek masalah”

“sejak maraknya TI, anak-anak usia sekolah berhenti sekolah karena tergiur dengan upah yang didapatkan dengan menambang atau membantu orangtua mereka menambang, bisa mendapatkan 50 ribu rupiah sehari lebih penting dari pada masuk sekolah” (kutipan wawancara dengan Abdul Rahim, 45 tahun, 23 Desember 2011)

Berdasarkan atas laporan penertiban dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (lihat juga dalam lampiran), terjadi beberapa kali penertiban dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang merasa terganggu karena aktivitas para penambang TI pada malam hari, khususnya dari kamp-kamp para pendatang yang memang dekat dengan lokasi kompleks pemukiman warga. Terjadinya pencurian alat-alat berat di lokasi pertambangan menjadi salah satu alasan seringnya dilakukan razia atau penertiban, mabuk, perkelahian antar penambang sehingga konflik karena perebutan lahan, melakukan *sweeping* di tempat-tempat lokalisasi.

Persaingan antara penduduk lokal dengan para pendatang yang menjadi pendatang merupakan gesekan yang selama ini masih bisa dikendalikan, tetapi dikhawatirkan suatu saat akan meledak ketika TI tidak lagi menjadi

primadona di Desa Lampur. Para penduduk lokal merasa bahwa kedatangan para pendatang berarti mengurangi jatah mereka akan timah, hal yang membuat mereka menahan diri selama ini adalah pemukiman penduduk menjadi lebih hidup dengan adanya pasar malam dan menguntungkan para pedagang. Kondisi ini tidak akan bertahan lama, karena produksi timah semakin menurun dan semakin ketatnya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP terhadap TI tanpa ijin menyebabkan para pendatang menjadi pengangguran, serta lahan bagi mereka untuk berpindah untuk ber-TI semakin sempit. Dalam salah satu wawancara dengan Kades baru Desa Lampur yaitu Abdullah, mengungkapkan bahwa:

“dari laporan masyarakat desa ne, makin lame karena timah lah sangat agik banyek e, make warga asli desa ne besaing kk pendatang, banyek yang ngerase dengan banyek e penambang pendatang, lahan jorang untuk nambang jadi bebagi, men tengah nih lo made bentrok serius, tapi banyek warga yang ngelapor barang-barang ilang, jorang curiga kaben pendatang tu lah tukang e, tapi bagus e ulik, dengan ade e jorang, ekonomi di desa ne jadi ningkat, ramai men malem karne ade pasar malem, tapi

masalah e men agik ade timah kek diambik mudah-mudahan dakde masalah tapi takut e sekarang ne razia makin galek, jadi otomatis kaben penambang to jadi nganggur, nek makan pasti e, takut e muet keributan di kampong ne”

“untuk sementara selama timah masih ada untuk ditambang walaupun ada laporan warga tentang kehilangan barang, situasi masih terkendali tetapi dikhawatirkan ketika timah semakin sedikit dan lahan untuk menambang pun semakin sempit ditambah razia yang semakin sering dilakukan oleh Pemda, maka tingkat pengangguran semakin banyak, hal positifnya dengan adanya para penambang geliat ekonomi Desa Lampur semakin bagus dan semakin ramai, dengan adanya pasar malam”

(wawancara dengan Kades Desa Lampur, 29/10/2012).

Analisis peneliti tentang dampak dari terus dilakukannya aktivitas penambangan di Desa Lampur sungguh relevan dengan perubahan dalam masyarakat yang terbagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, perubahan peradaban, dikaitkan dengan unsur-unsur atau aspek yang lebih bersifat fisik, seperti mesin-mesin, sarana komunikasi dan sebagainya berjalan lebih cepat. *Kedua*,

perubahan budaya berhubungan dengan aspek rohaniah, seperti pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, dan penghayatan seni. Norma hubungan antara anak dan orangtua, peserta didik dengan pendidik, antara bawahan dan atasan, norma-norma ini, meskipun mengalami perubahan, tidak bisa secepat barang-barang peradaban. *Ketiga*, perubahan pada pola perilaku.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Lampur bersifat fisik dimana hampir diseluruh aspek dalam kehidupan mereka berubah, terlebih ketika ukurannya adalah waktu PT. Timah, Tbk. meninggalkan Desa Lampur, karena setelah maraknya TI di desa setempat, maka pola perilaku dan kehidupan masyarakat Desa Lampur rata-rata berubah dengan cepat. Perubahan tentang norma khususnya antara pendidik dan terdidik berubah karena berkurangnya peserta didik yang berubah haluan menjadi penambang TI, dan mereka sekarang menjadi pengangguran putus sekolah.

Karakter masyarakat Lampur sangat heterogen dikarenakan rata-rata mereka adalah para pendatang dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejak awal adanya PT. Timah dengan kompleks perumahannya yang

megah, dan ramainya kehidupan pada tahun 1970-an merupakan daya tarik bagi penduduk sekitar untuk berdatangan ke desa Lampur. Setelah PT. Timah, Tbk. meninggalkan desa Lampur, para pendatang tersebut yang tetap tinggal dan membaur dengan segelintir penduduk asli, mereka yang memutuskan untuk tinggal adalah mantan karyawan PT. Timah, Tbk. pada masa itu, kemudian bertani, menjadi nelayan tetapi ada pula menjadi pegawai pemerintah, tetapi semua berubah dengan cepat ketika secara ekonomi kehidupan masyarakat meningkat dikarenakan adanya TI. Seperti diungkapkan oleh Abdur Rahim yang merupakan mantan Kades Lampur kepada peneliti:

“duluk desa ni ramai taun 70-an waktu, nil ah pusat e selain di Pangkal Pinang, liet lah perumahan elit kaben pejabat timah dulu, banyek urang datang ke sini, ku ge sebener e urang datang, tapi apak kami asli kampung ne, sudeh e PT. Timah pindah dari sini, otomatis kampung ne, listrik kadeng idup kadeng mati, pukok e sepi, banyek jadi nelayan kek bekebon, tapi sejak kite jadi propinsi, mulai lah semuen e ramai-ramai be TI, urang dateng bae ke sini, lahan ape ge digalik urang awal e,

sudeh karne banyek protes warga baru lah kite lokalisasikan di satu titik, untuk TI daret e”

“ketika masih ada PT. Timah di Desa Lampur, masyarakat berdatangan, namun setelah ditinggalkan di tahun 1970-an Lampur menjadi desa sepi hanya mengandalkan hidup dari berkebun sahang, karet ataupun turun ke laut menjadi nelayan, yang menjadi pegawai pun sangat sedikit, tetapi semuanya bergeliat ketika terbentuk menjadi provinsi sendiri dan menambang dibebaskan bagi masyarakat” (wawancara dengan Kades, 23/12/2011).

Berdasarkan observasi dan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada akhirnya yang menjadi korban-korban perubahan sosial adalah para penambang, para masyarakat yang hidup berdampingan dengan mereka, bersentuhan langsung dan berinteraksi, perubahan terjadi secara instan dan membuktikan tidak jarang membawa perubahan ke arah negatif, sebagian kelompok terbuai dengan pendapatan instan walaupun sebenarnya mereka hanya mendapatkan ampas dari praktik perdagangan timah. Setelah cadangan timah sudah habis, yang tersisa adalah dampak dari perubahan sosial yang

terlanjur terjadi sementara para aktor lokal, elit politik, yang benar-benar menikmati keuntungan dari hasil eksploitasi timah, tidak akan pernah merasakan dampak dari penambangan Timah Inkonvensional secara mendasar.

6. Rekomendasi Untuk Pemerintah Daerah Bangka Tengah

Dampak dari penambangan Timah Inkonvensional terutama jelas terlihat dari pola segi ekonomi, berubahnya taraf kehidupan masyarakat di Desa Lampur menjadi lebih baik serta membuat masyarakat menjadi konsumtif dari masyarakat tradisional secara ekonomi karena sebelumnya hanya mengandalkan penghasilan sebagai petani lada dan nelayan, inilah kemudian disebut dengan sebutan masyarakat transisi. Weber dengan jelas mengatakan bahwa manusia berjuang menggapai kekuasaan hanya untuk memperkaya diri secara ekonomi, bahkan seringkali usaha meraih kekuasaan tersebut dikarenakan adanya *prestise* yang ingin diraih. Kekuasaan, kehormatan sosial menjadi dasar mengapa pergulatan tentang regulasi pertimahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak akan pernah terselesaikan sampai kandungan

cadangan timah di Kepulauan Bangka Belitung habis tidak bersisa.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah sangat diharapkan untuk terus memberikan dukungan dan penghargaan kepada aparat pemerintah di Desa Lampur sehingga lebih baik dalam mengelola desa dan terus bisa dijadikan tempat bagi masyarakat untuk membantu memecahkan masalah khususnya terkait dengan sikap aparat Pemda ketika melakukan razia.

Pemberdayaan sumber daya alam selain timah perlu lebih ditingkatkan, misalnya sektor pariwisata dan sekiranya setiap peluang untuk mendatangkan investor dan wisatawan ke dalam daerah dikelola dengan serius. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah penambangan dan adanya suatu usaha untuk menarik kembali anak-anak yang sempat putus sekolah karena tergiur untuk menambang TI agar mau bersekolah lagi. Pemerintah Daerah hendaknya lebih memusatkan perhatian dengan menggalakkan kembali budaya berkebun dan bertani dalam rangka investasi jangka panjang, terutama bagi para penambang yang tadinya adalah para petani lada dan karet. Penyediaan

bibit serta kemudahan bagi mereka yang mau berkebun kembali untuk mendapatkan bibit lada maupun tanaman palawija lainnya, serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perihal memasarkan hasil perkebunan tersebut disertai dengan jaminan harga yang sesuai sehingga para petani tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan dan menjadi motivasi mereka untuk terus bertani dan memaksimalkan hasil perkebunan mereka sehingga kualitas hasilnya tidak kalah dengan pasar domestik maupun ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, 2007. *Birokrasi*, diterjemahkan oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Bertens, K., 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Black, James, 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Eresco, Bandung.
- Cooper, David, 2010. *Illusions of Equality (International Library of the Philosophy of Education)*, New York.
- Damsar, 1997. *Sosiologi Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2003. *Prospek Pengembangan Pertambangan dan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang.
- Dua, Mikhael, 2008. *Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Kanisius, Yogyakarta.
- Erman, Erwiza, 2007. *Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka dalam Politik Lokal di Indonesia*, editor: Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken dibantu oleh Ireen Karang-Hoogenboom, Yayasan Obor Indonesia-KITLV, Jakarta.
- _____, 2009. *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap, Mengungkap Sejarah Timah di Bangka Belitung*, Ombak, Yogyakarta.
- Garvey, James, 2010. *Karya Filsafat Terbesar*, diterjemahkan oleh CB. Mulyatno Pr., Kanisius, Yogyakarta.
- Giddens, Anthony, 2007. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis terhadap Karya-Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, diterjemahkan oleh Soeheba Kramadibrata, UI-Press, Jakarta.
- Harliyana, 2008. *Pengaruh Penambangan Timah Rakyat Terhadap Perubahan Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pemali Kab.*

- Bangka*, Tesis, Tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Haryadi, Dwi, 2011. *Potret Hukum di Babel dalam Sekaput Ancup of Bangka Belitung*, Penerbit Khomza bekerjasama dengan Ilalang Institute, Yogyakarta.
- Holimin, 2003. *Peranan Industri Penambangan Timah dalam Dinamika Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di PT. Timah, Tbk., Kab. Bangka)*, Tesis, Tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ibrahim, 2011. *Pertimahan Dalam Perspektif Ekonomi Pancasila (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*, Desertasi, Tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2002. *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Propinsi*, Pustaka Selawang Sedulang bekerjasama dengan Philosophy Press, Yogyakarta.